

**ANALISA REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL DALAM MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG BERDASARKAN UU PERPAJAKAN PADA PT. XYZ TAHUN
2022**

Nama : Hanantasari Dwi Pramesthi
NIM : 1021910027
Pembimbing : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A.

ABSTRAK

Semua badan usaha dan perorangan di Indonesia secara hukum diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, terlepas dari apakah kewajiban tersebut besar atau kecil, bergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh orang pribadi atau perusahaan tersebut. Kemampuan bangsa untuk mengelola dan membiayai pembangunannya sendiri secara mandiri merupakan indikator kemandirian suatu negara. Pembayaran pajak merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dan menggarisbawahi peran rakyat dan perusahaan dalam menghasilkan dana untuk mendukung negara dan memfasilitasi pembangunan nasional. Pajak Penghasilan (PPh) menempati kedudukan tertinggi di antara berbagai jenis pajak, karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak negara dibandingkan dengan pajak lainnya. Untuk perhitungan pajak penghasilan terutang, laporan keuangan dipisahkan menjadi dua kategori: laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Namun, dalam laporan keuangan tersebut, pengukuran dan pengakuan berbagai unsur belum tentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Khususnya, perbedaan dapat muncul dalam konsep seperti penyusutan antara prinsip akuntansi dan peraturan pajak. Penelitian ini membahas keterbatasan yang melekat dalam penerapan UU HPP pada klaster pajak penghasilan 2022 dan menyempurnakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan masa manfaatnya. Selain itu, penelitian ini menyempurnakan keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menggabungkan uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Bersifat kualitatif, penelitian ini

mengadopsi desain penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara langsung keadaan atau fenomena dalam suatu perusahaan. Ruang lingkup penelitian meliputi laporan keuangan komersial PT. XYZ 2022, PT. XYZ 2022, PPh Badan, dan Pasal 29 UU PPh. Subyek penelitian terdiri dari PT. XYZ, sebuah perusahaan jasa logistik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PT. XYZ telah melaksanakan proses rekonsiliasi pajak yang patut dipuji. Namun, penulis mengidentifikasi biaya tertentu, item pendapatan, dan entri penyusutan dalam perusahaan yang belum dikategorikan secara akurat menurut masing-masing akun dalam laporan laba rugi.

Kata Kunci: Laporan keuangan, Laporan Laba Rugi, rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan



**FISCAL RECONCILIATION ANALYSIS OF THE COMMERCIAL
FINANCIAL STATEMENTS IN DETERMINING THE INCOME
TAXPAYABLE BASED ON THE TAXATION LAW AT PT. XYZ YEAR
2022**

Student Name : Hanantasari Dwi Pramesthi
Student Identity Number : 1021910027
Supervisor : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A.

ABSTRACT

All businesses and individuals in Indonesia are legally obligated to fulfill their tax obligations in accordance with the prevailing regulations, irrespective of whether these obligations are substantial or minimal, contingent on the profit generated by the individual or company. The nation's capacity to independently manage and finance its own development is an indicator of self-sufficiency within a country. Tax payments constitute a tangible manifestation of the state's responsibilities and underline the role of both the populace and corporations in generating funds to support the state and facilitate national development. Income Tax (PPh) holds a paramount status among various taxes, as it contributes significantly to the state's tax revenue compared to other taxes. For the calculation of income tax payable, financial statements are segregated into two categories: commercial financial reports and fiscal financial reports. However, in these financial reports, measurement and recognition of various elements may not necessarily align with the criteria set by tax regulations. Notably, differences can arise in concepts such as depreciation between accounting principles and tax regulations. This research addresses limitations inherent in applying the HPP Law to the 2022 income tax cluster and refining the computation of asset depreciation based on their useful life. Additionally, this study enhances previous research limitations by incorporating data validity tests using source triangulation and method triangulation. Qualitative in nature, this research adopts a descriptive research design, aiming to directly depict the circumstances or phenomena within a company. The research scope includes the commercial financial statements of PT. XYZ 2022, PT. XYZ 2022,

Corporate Income Tax, and Article 29 of the Income Tax Law. The research subjects consist of PT. XYZ, a logistics services company. The findings of this study indicate that PT. XYZ has executed a commendable tax reconciliation process. However, the author identifies certain expenses, income items, and depreciation entries within the company that have not been accurately categorized according to the respective accounts within the income statement.

Keywords: Financial statements, Profit and Loss Reports, Fiscal reconciliation, Income Tax

